

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan hal yang krusial dalam suatu organisasi, dengan sumber daya manusia yang handal dapat menjadi keunggulan yang kompetitif dari suatu organisasi. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, sumber daya manusia yang kompetitif ini juga sangat diperlukan, dengan sumber daya yang mumpuni dalam pemerintahan, maka pemerintah mampu untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Sumber daya manusia yang baik ini tentunya didukung oleh kinerja dari masing-masing aparatur pemerintahan.

Kinerja aparatur sipil negara (ASN) akhir-akhir ini menjadi perhatian penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan. Kinerja aparatur pemerintah dinilai masih menjadi suatu permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lemahnya kinerja dalam hal pelayanan publik menurut Moenir dalam (Mukarom dan Laksana, 2016:44) disebabkan oleh:

- a Tidak adanya kesadaran terhadap tugas/kewajiban yang menjadi tanggung jawab pelayanan publik sehingga ASN yang bertugas melayani dengan santai, dimana masyarakat sebagai penerima layanan harus menunggu untuk dapat menikmati hasil dari layanan yang diberikan.
- b Sistem, prosedur, dan metode kerja tidak memadai sehingga mekanisme kerja tidak berjalan sesuai dengan harapan.

- c Pengorganisasian tugas pelayanan belum serasi sehingga terjadi kesimpangsiuran penanganan tugas dan tumpang tindih.
- d Pendapatan pegawai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, pegawai tersebut berusaha mencari tambahan pendapatan dalam jam kerja cara menjual jasa pelayanan.
- e Kemampuan pegawai tidak memadai untuk tugas yang dibebankan kepadanya. Akibatnya, hasil pekerjaan tidak memenuhi standart yang telah ditetapkan.
- f Tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai. Akibatnya, pekerjaan menjadi lamban, membuang banyak waktu dan penyelesaian masalah menjadi terhambat. (Mukarom dan Laksana, 2016:44).

Pertumbuhan teknologi di masa globalisasi terus semakin canggih, bukan sekedar melahirkan masa informasi global melainkan media informasi dan telekomunikasi yang tidak mengenal waktu maupun tempat. Timbulnya alat- alat elektronik yang serba canggih dalam kehidupan warga, dan memudahkan para pegawai dalam mengakses data ataupun mengolah informasi dengan memakai aplikasi yang hendak menolong memperoleh, memelihara, mengendalikan, serta mengolah sampai akses informasi lebih mudah untuk digunakan. Kegunaan manajemen informasi selaku penghubung antara database dengan macam komponen sistem data yang lain. Komponen dalam sistem informasi yang memberi kepastian bahwa ragam data yang dimiliki lebih akurat, kekinian, aman, dan juga siap digunakan.

Bersamaan pertumbuhan teknologi data digital yang lumayan pesat, pemakaian teknologi data oleh pemerintah buat membagikan data serta pelayanan untuk warganya, dan hal- hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Salah satu contohnya adalah, timbulnya sistem elektronik

absensi (E-Absensi) berbasis *online*, baik berbasis *website* ataupun *mobile application*.

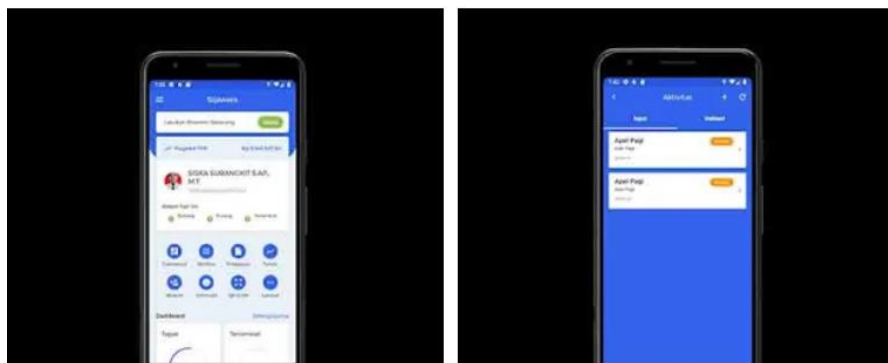
Sistem Informasi Kinerja Pegawai dan Remunerasi (Sijawara) merupakan aplikasi yang dibuat sebagai sarana untuk pengelolaan absensi, aktivitas dan kepegawaian secara personal. Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Subang, Sistem Informasi Absensi Pegawai, Sijawara layanan *one stop service* Kepegawaian, yang berisi beberapa layanan yakni absensi *online* berbasis lokasi kantor, pelaporan dan pencatatan aktivitas, validasi aktifitas, permohonan izin dan validasi izin, informasi kehadiran, informasi data Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), informasi profil kepegawaian, dan layanan lain yang dapat ditambahkan pada *update* aplikasi Sijawara berikutnya.

Aplikasi Sijawara di dukung oleh aplikasi simpeg untuk keperluan data pegawainya. Apabila ada kekurangan dan atau kesalahan data pada profil *user*, mohon berkordinasi dengan Bagian Umum dan Kepegawaian. Sijawara akan terus tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan ASN Kabupaten Subang.

Aplikasi Sijawara menarik data dan mengumpulkan “Informasi Pribadi” terkait kepegawaian sebagai ASN dilingkungan kedinasan Pemerintah Kabupaten Subang yang seutuhnya bersumber dari Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing yang di inputkan oleh admin kepegawaian tingkat OPD yang berwenangkan untuk mengisi data kepegawaian masing-masing instansi pada aplikasi portal E-ASN dalam hal

ini melalui sub aplikasi Sijawara. Informasi pribadi dimaksud adalah Nomor Induk Pegawai (NIP), Nama dan gelar, jenis kelamin, tanggal lahir, jabatan dan golongan, lokasi koordinat titik pengambilan absensi dan data laporan absensi harian sesuai hari kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Gambar 1.1
Aplikasi Sijawara



(Sumberfoto:https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.subang.sijawara_ diakses pada tanggal 4 Mei 2022)

Berdasarkan Surat Menteri PANRB No B/2338/M.PANRB/06/2016 Tanggal 27 Juni 2016 tentang Penggunaan Absensi Berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan “mengoptimalkan penggunaan sistem absensi berbasis elektronik guna menghindari adanya kecurangan dan/atau manipulasi data yang berhubungan dengan kehadiran pegawai”. Dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pemerintah Kabupaten Subang perlu menyikapi Peraturan Presiden dimaksud dengan mengambil langkah untuk melaksanakan dan mengembangkan *E-Government* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Menteri Komunikasi dan Informatika (MENKOMINFO) Republik Indonesia mengeluarkan peraturan No. 41 Tahun 2014 Tentang Pencatatan Kehadiran pada Bab 3 Bagian Kesatu Umum Pasal 3. Setiap pegawai wajib melakukan perekaman kehadiran pada mesin presensi berupa sidik jari atau wajah.

Peraturan Bupati Subang No. 45 Tahun 2015 Tentang Implementasi *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, dalam upaya mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan transparansi dan kualitas pelayan publik secara efektif dan efisien. Adanya struktur administrasi yaitu melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerinah Kabupaten Subang, lalu dilanjutkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kabupaten Subang, kemudian dilanjutkan kepada pimpinan pada Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing, dan dijalankan oleh ASN, Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), Tenaga Ahli dan Honorer yang telah terdaftar dengan nomor indentitas kerjanya.

Gambar 1.2 Artikel Permasalahan

← → ↻ www.mediajabar.com/news/kinerja-asn-subang-bisa-dipantau-lewat-aplikasi-sijawara

Kinerja ASN Subang Bisa Dipantau Lewat Aplikasi Sijawara

Adih Rohendi — Selasa, 18 Januari 2022



Lebih lanjut Aris mengatakan bahwa untuk disiplin di bawah batas wajar masih kurang dari 0,5 persen dari jumlah PNS biasanya indikasinya itu di berikan sanksi dan pelanggaran terkait dengan hal-hal yang rutin yang bisa diselesaikan oleh masing-masing terhadap undang-undang ataupun hal-hal lain yang langsung biasanya langsung ditangani.

"Terkait dengan aplikasi absensi jawara itu adalah suatu sistem Dalam rangka percepatan gravitasi kepegawaian di setiap orang dengan teknologi yang sekarang bisa melakukan absensi dengan handphone jadi lebih simpel nanti mereka bisa menginput aktivitas kegiatannya untuk diketahui oleh pimpinan sehingga pengguna dapat membantu Apa yang dilakukan oleh anak buahnya itu," imbuhnya.

Aris Juga meminta bahwa kepala perangkat daerah diberikan kewenangan untuk menegur dan melakukan pembinaan sekaligus melakukan pemberian hukuman disiplin sesuai dengan kewenangannya.

"Maka tidak ada alasan lagi bahwa saya tidak berani anak buah saya kurang disiplin itu sudah diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan memberikan hukuman sesuai dengan kewenangannya tidak ada dan tidak karena itu secara

"Selaku pejabat pemerintahan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkup di tingkat daerahnya masing-masing," katanya.

Sementara itu Aris juga menerangkan bahwa di Pemerintahan Kabupaten Subang, selama 4 bulan ini untuk aplikasi Sijawara sudah mulai diaktifkan semacam Google, maka bila ada persoalan ASN yang tidak mentaati aturan itu bisa dihukuman disiplin seperti hukuman ringan, sedang dan berat.

"Untuk hukuman ringan dan sedang itu dilaksanakan dan dibina oleh perangkat daerahnya masing-masing, untuk hukuman berat apabila perangkat daerahnya memandang langkah-langkah yang diambilnya sudah selesai dengan kewenangannya tapi tidak menunjukkan hasil yang positif maka dilaporkan ke pimpinan lebih tinggi selaku tim penilai disiplin kabupaten," katanya.

(Sumber foto: <https://www.mediajabar.com/news/kinerja-asn-subang-bisa-dipantau-lewat-aplikasi-sijawara> diakses pada tanggal 4 Mei 2022)

Permasalahan penelitian ini sesuai dengan pengamatan peneliti ditahun lalu saat melaksanakan magang di Sekreariat Daerah Kabupaten Subang masih banyaknya pegawai yang sekedar absen untuk ke kantor tapi tidak ada diruangan saat jam kerja, kemudian kurangnya tim ahli diberbagai bagian disisi lain pegawai yang ada kurang memahami atau menguasai ilmu pada posisi jabatan yang saat itu menjadi tanggungjawabnya sehingga memperlambat pekerjaan. Permasalahan tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.

Kinerja aparatur sipil negara (ASN) mempunyai dampak yang besar kepada kualitas layanan yang diberikan terhadap masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan dari pelanggan atau masyarakat. Apabila pelanggan atau masyarakat merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang diberikan, maka dapat menunjukkan bahwa kinerja pelayanan yang diberikan tidak maksimal. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tidak terkecuali yang terjadi di Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan tonggak aturan penerapan kedisiplinan bagi seluruh pegawai negeri dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar tercipta tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tentu diperlukan disiplin para pejabat dan administrasi kepegawaian.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Leonardus Joy Phinky Seran pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Terhadap Kualitas Layanan Pada Masyarakat Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur” beliau menyatakan bahwa hasil dari penelitiannya ini menunjukkan bahwa Kinerja ASN yang diukur melalui Efektivitas dan Efisiensi, Otoritas dan Tanggung Jawab, Disiplin, dan Inisiatif berpengaruh terhadap Kualitas Layanan yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu. (*jurnal Prosiding*

Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Diakses pada tanggal 29 Mei 2022).

Berdasarkan peneliti terdahulu dari Amiartuti Kusmaningtyas pada tahun 2014 dengan judul “KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEMERINTAH KOTA MATARAM” beliau menyatakan bahwa hasil penelitian ini ASN Pemerintah Kota Mataram cukup dewasa dalam mengemban tugas sebagai aparatur sipil negara. Kesiapan dalam menjalankan tugas serta kewajiban dijalankannya dengan penuh tanggung jawab, tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Hal ini dibuktikan dengan tidak berpengaruhnya komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja, yang berarti bahwa ASN Pemerintah Kota Mataram akan tetap menjalankan tugas dengan setia dan tidak mengesampingkan hal-hal yang bersifat pribadi apalagi untuk kepentingan diri sendiri. (*Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Diakses pada tanggal 29 Mei 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Desty Pratiwi & Silverius Tey Seran pada tahun 2018 dengan judul “STRATEGI PENINGKATAN KINERJA ASN MELALUI APLIKASI PENILAIAN KINERJA APARATUR (SIKERJA) DI IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT” beliau menyatakan bahwa hasil penelitian ini yaitu strategi peningkatan kualitas pekerjaan melalui pelaksanaan evaluasi tugas sesuai tugas pokok dan SOP, pembaharuan aplikasi secara periodik khususnya dalam hal pencantuman tombol bukti output baik dalam bentuk gambar, foto atau dokumen. Strategi peningkatan kuantitas pekerjaan melalui pelayanan SIKERJA oleh biro kepegawaian bagian

pengembangan karir yang dapat diakses secara langsung maupun melalui media sosial. (*jurnal manajemen ilmu pemerintahan*. Diakses pada tanggal 29 Mei 2022).

Berdasarkan dari ketiga penelitian terdahulu diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kinerja ASN sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain dari perilaku pribadi beberapa indikator juga sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja ASN.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu sama – sama tertarik membahas tentang kinerja ASN untuk menciptakan pelayanan yang maksimal. Perbedaannya yaitu dari segi lokasi penelitian, waktu penelitian, dan penelitian peneliti ini lebih kearah sejauh mana penerapan *e-government* yang diterapkan dapat menciptakan capaian kinerja ASN yang maksimal.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan refrensi untuk peneliti-peneliti berikutnya yang mau melaksanakan riset tentang kinerja ASN. Serta hasil riset ini jadi data dan bahan buat kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah Kabupaten Subang melalui Sistem Informasi Kinerja Pegawai Dan Remunerasi (Sijawara) dan mengenali kelemahan- kelemahan yang terjalin. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu : Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Melalui Sistem Informasi Kinerja Pegawai dan Remunerasi (Sijawara).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hasil kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah Kabupaten Subang melalui Sistem Informasi Kinerja Pegawai dan Remunerasi (Sijawara) dilihat dari indikator kuantitas, kualitas, dan efisiensi?
2. Bagaimana perilaku kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah Kabupaten Subang melalui Sistem Informasi Kinerja Pegawai dan Remunerasi (Sijawara) dilihat dari indikator disiplin kerja, inisiatif, dan ketelitian?
3. Bagaimana sifat kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah Kabupaten Subang melalui Sistem Informasi Kinerja Pegawai dan Remunerasi (Sijawara) dilihat dari indikator kepemimpinan, kejujuran, dan kreativitas?

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah Kabupaten Subang melalui Sistem Informasi Kinerja Pegawai dan Remunerasi (Sijawara).

Setiap penelitian harus mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan, dengan perumasan masalah yang

peneliti kemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah Kabupaten Subang melalui Sistem Informasi Kinerja Pegawai dan Remunerasi (Sijawara) dilihat dari indikator kuantitas, kualitas, dan efisiensi.
2. Untuk menganalisis perilaku kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah Kabupaten Subang melalui Sistem Informasi Kinerja Pegawai dan Remunerasi (Sijawara) dilihat dari indikator disiplin kerja, inisiatif, dan ketelitian.
3. Untuk mengamati sifat pribadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah Kabupaten Subang melalui Sistem Informasi Kinerja Pegawai dan Remunerasi (Sijawara) dilihat dari indikator kepemimpinan, kejujuran, dan kreativitas.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

a). Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai teori kinerja sebagaimana sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari peneliti di Program Studi Ilmu Pemerintahan.

b) Secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran/masukan kepada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Subang melalui Sistem Informasi Kinerja Pegawai dan Remunerasi (SIJAWARA). Kegunaan secara praktis kemudian terbagi menjadi sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dasar perluasan penelitian dan penambahan wawasan untuk pengembangannya.

2. Bagi Universitas Komputer Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi perpustakaan dan bahan pembandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan penelitian berikutnya di bidang yang sama di masa mendatang.

3. Bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang akan melaksanakan penelitian dimasa mendatang.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi atau wawasan kepada masyarakat yang sedang atau akan berkunjung ke Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.

5. Bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Subang

Diharapkan dapat membagikan masukan dalam perihal memastikan kebijaksanaan serta mengambil keputusan untuk meningkatkan disiplin kerja para pegawainya.